



Walikota Magelang bersama Rektor Unimma.

## REKTOR UNIMMA BERTEMU WALIKOTA Beberapa Hal Jadi Bahan Pembicaraan

**MAGELANG (KR)** - Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Dr Lilik Andriyanti SE MSi dan tim dari Unimma melakukan pertemuan dengan Walikota Magelang Damar Prasetyono di ruang kerjanya. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini.

Informasi yang diperoleh KR dari Unimma, Selasa (22/4), menyebutkan ada beberapa hal yang disinggung dalam pertemuan Senin (21/4) lalu tersebut. Beberapa hal tersebut diantaranya kerjasama Unimma dengan RSUD Tidar Magelang perlu dilanjutkan untuk persiapan visitasi kedokteran. Juga harapannya Unimma dapat ikut berperan serta dalam program pendidikan karakter (SD-SMP), pengembangan smart city dengan Fakultas Teknik.

Dalam pertemuan ini Rektor Unimma didampingi Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Infrastruktur Unimma Dr Muh Imron Rosyidi ST MSi, Wakil Rektor 4 Bidang Ns Sigit Prayitno MKep, Dosen Fikes Ns Kartika Wijayanti MKep maupun lainnya.

Sementara itu Walikota Magelang secara terpisah kepada KR mengatakan, pihaknya akan menjalin perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang. Dia mengatakan bahwa pihaknya memiliki tujuan yang sama untuk bagaimana mencari solusi tentang program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya pendidikan karakter, UMKM, Smart City maupun lainnya.

Dibenarkan Walikota Magelang, bahwa sempat disinggung mengenai segera diluncurkan atau launching Fakultas Kedokteran Unimma, yang akan bekerjasama dengan RSUD Tidar Kota Magelang. RSUD Tidar ini akan menjadi rumah sakit pendidikan juga.

Dengan dibukanya Fakultas Kedokteran ini, lanjut Walikota Magelang, diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat luas untuk menyekolahkan putra-putrinya di Kota Magelang, khususnya di Fakultas Kedokteran Unimma. Dan ini juga dapat menggerakkan ekonomi, banyak orang dari luar daerah yang masuk ke Kota Magelang, berkegiatan di Kota Magelang, khususnya nanti setelah ada fakultas baru, Fakultas Kedokteran. (Tha)-f

## TEKAN KERUGIAN PAJAK Pembab Sukoharjo Tertibkan Reklame Liar

**SUKOHARJO (KR)** - Pembab Sukoharjo gencarkan razia penertiban reklame liar. Tindakan tegas dilakukan sebagai upaya menekan kerugian pajak. Sebab keberadaan reklame liar tersebut meresahkan dan berdampak pada kerugian negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Selasa (22/4) mengatakan, penertiban reklame liar menjadi prioritas bagi Pembab Sukoharjo. Terlebih lagi setelah ada rekomendasi dari DPRD Sukoharjo hasil kesimpulan rapat bersama.

Keberadaan reklame liar tersebut meresahkan dan berdampak besar pada kerugian negara khususnya sektor pajak. Sebab reklame tersebut dipasang tidak sesuai aturan tanpa izin. Terpenting juga reklame tidak membayar pajak.

"Pembab Sukoharjo gencarkan penertiban reklame liar karena berdampak pada kerugian sektor pajak. Reklame liar tersebut melanggar aturan perizinan dan tata cara pemasangan karena sering dipasang sembarangan dan membahayakan masyarakat," ujarnya.

Pembab Sukoharjo sudah meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan BPKPAD. Kedua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta saling berkoordinasi dan melakukan penertiban reklame liar.

Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, mengatakan, sektor pajak khususnya terkait kerawanan kerugian dari reklame liar menjadi sorotan. Sebab potensi kerugian yang ditimbulkan nilainya cukup besar. (Mam)-f

## BERKURANG 116 HEKTARE Ratusan Hektare Lahan Pertanian Beralih Fungsi

**SALATIGA (KR)** - Ratusan lahan pertanian di Kota Salatiga tiap tahun mengalami penyusutan karena banyak yang alih fungsi menjadi bangunan. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Salatiga mencatat, mulai 2019 sampai 2023 ratusan hektare lahan pertanian yang tersebar di sejumlah 4 kecamatan yang ada beralih menjadi perumahan, bangunan tempat usaha dan lainnya.

Kepala Dispangtan Salatiga Henni Mulyani kepada wartawan mengungkapkan tahun 2020 di Salatiga masih terdapat lahan sawah 631 hektare. Kemudian tahun 2021 menyusut menjadi 627 hektare. Selanjutnya 2023, menyusut lagi menjadi 515 hektare hingga tahun 2024.

Sedang luas lahan kering dari data yang ditetapkan pada 2024 lalu 1839,5 hektare dan lahan lainnya 3,5 hektare. "Sejak 2019 hingga 2023, lahan sawah berkurang 116 hektare. Lahan sawah per tahun rata-rata berkurang 20 hingga 30 hektare, telah beralih fungsi," jelas Henni Mulyani kepada wartawan, Selasa (22/4).

Tahun 2025 ini, dinas akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilik lahan sawah untuk mempertahankan lahannya supaya tidak beralih fungsi. Dispangtan juga membuat program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 279,32 hektare dan LCP2B seluas 133,31 hektar.

Dispangtan akan memberikan insentif kepada petani seperti subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan saprodi apabila nanti bisa tercapai kesepakatan antara Pemkot Salatiga dengan pemilik lahan. Pengendalian tata ruang dan perizinan yang menyangkut potensi alih fungsi lahan sawah sangat penting dilakukan. "Kami akan berupaya untuk mempertahankan lahan pertanian di Salatiga agar tidak beralih fungsi lagi," pungkasnya. (Sus)-f

## RENCANA DIMULAI 2025

# Penanganan Rob di Demak Dibantu Pemerintah Pusat

**DEMAK (KR)** - Penanganan banjir dan rob di Kabupaten Demak dibantu pemerintah pusat. Maka itu menjadi strategis nasional terintegrasi dan berkelanjutan. Hal tersebut ditempuh agar aktifitas ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan.

Wakil Bupati Demak KH Muhammad Badruddin menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, memberikan perhatian serius pada persoalan rob yang selama ini melanda wilayah pesisir Kabupaten Demak. Termasuk di dalamnya banjir rob di Kecamatan Sayung, yang telah menggenangi jalur pantura.

Dia menjelaskan, hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bersama Bupati Eisti'annah mengikuti retreat di Magelang.

"Pak AHY menyampai-

kan rencana pembangunan sistem pengendalian rob di kawasan pantai utara Jawa. Proyek strategis nasional tersebut diproyeksikan mulai dilaksanakan pada 2025, setelah AHY mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto," ujarnya, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Penyerahan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Demak 2025-2029, Selasa (22/4).

AHY juga menyampaikan, penanganan rob di wilayah pantura, termasuk Demak bukan proyek biasa, tapi bagian dari program strategis nasional untuk menyelamatkan kawasan pesisir. Di antaranya dengan membangun sea wall.



Wabup Demak KH Muhammad Badruddin saat menyerahkan ranwal RPJMD Kabupaten Demak 2025-2029 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Wabup Badruddin menambahkan, Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah paling terdampak rob dan sudah kehilangan banyak kawasan permukiman. Berikut akses jalannya, akibat abrasi dan genangan air laut yang terus meningkat. "Wilayah kami butuh perhatian serius. Kami berharap proyek ini menjadi prioritas karena

menyangkut keselamatan dan masa depan ribuan warga," ungkapnya.

Sehubungan itu pemerintah daerah terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, agar pelaksanaan proyek tersebut tidak mengalami keterlambatan. "Beliau (AHY) menyatakan, anggaran sudah disiapkan, dan pelaksanaan akan dimulai tahun

ini. Tentunya kami menyambut baik komitmen itu," kata Wabup, yang kebetulan juga berdomisili di kawasan terdampak rob.

Maka itu Pemkab Demak telah memasukkan penanganan rob sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. (\*)-f

## MAGELANG MENYAPU BERSAMA

# Ajak Masyarakat Lebih Sadari Budaya Bersih

**MAGELANG (KR)** - Acara "Ngrawat Magelang" berupa Program "Magelang Menyapu Bersama" diluncurkan di Kota Magelang, Selasa (22/4). Walikota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Walikota Magelang dr Sri Harso MKes SpS berbaur dengan para pemangku kepentingan setempat melakukan gerakan bersih-bersih sampah dan rumput di beberapa lokasi di wilayah Kota Magelang.

Kepada KR di sela-sela kegiatan, Walikota Magelang mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kluster "Ngrawat Magelang". Masyarakat diajak untuk lebih menyadari budaya bersih, keindahan, kerapian dan ketertiban.

Ini juga menuntut kesadaran kolektif semua warga mengenai pentingnya kebersihan dan kerapian. "Ini untuk mereka, untuk masyarakat," tambahnya. Walikota Magelang juga mengingatkan tentang arti pentingnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan kerapian ini. Dari sini diyakini akan lebih dipermudah Allah SWT. Semangatnya adalah semangat kebersamaan. Juga disinggung, bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman.

Sementara itu saat memimpin Apel Peresmian Gerakan "Magelang Menyapu Bersama", yang dikaitkan dengan Hari Bumi Sedunia, Walikota Magelang mengatakan merawat

lingkungan merupakan tanggung jawab semua, mulai dari hal sederhana seperti menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan selokan,

hingga menyapu halaman dan merawat ruang terbuka hijau di sekitar. "Semua itu merupakan bentuk cinta kita kepada bumi, dan bukti nyata kepedulian kepada Kota Magelang,"



Rangkaian kegiatan "Ngrawat Magelang" berupa program "Magelang Menyapu" saat berlangsung, Selasa (22/4)

## PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

# Diarahkan untuk Penopang Swasembada Pangan

**PATI (KR)** - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Rencana pembangunan daerah di Jawa Tengah pada 2026 akan diarahkan untuk penopang program swasembada pangan. Kebijakan

tersebut sebagai tindak lanjut dari pembangunan tahun ini (2025) yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ah-

mad Luthfi saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (21/4). Musrenbangwil dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.

Musrenbangwil ini dimanfaatkan oleh Gubernur untuk belanja masalah di Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Luthfi minta kepada seluruh bupati di wilayah tersebut untuk benar-benar memetakan permasalahan yang berkaitan dengan arah penguatan sebagai lumbung pangan atau swasembada pangan.

"Ini baru belanja masalah awal. Akhirnya nanti pada saat kita Musrenbang tingkat provinsi. Kita akan mengundang beberapa tokoh dan lapisan masyarakat. Dalam Musrenbangprov nanti forkopimda akan menyampaikan problem solving di wilayah masing-masing untuk 2026," tutur Gubernur.

Menurut Luthfi, sebagai daerah penumpu pangan nasional, Jawa Tengah telah ditargetkan untuk bisa menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat sampai April 2025 saja produksi padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton.

Untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, maka semua sector terkait harus melakukan kerjasama. Untuk itu, semua daerah di Jawa Tengah harus tegas dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian, dan fasilitas-fasilitas terkait seperti saluran air primer, sekunder, dan tersier harus tuntas diperbaiki.

"Kita harus melakukan pemetaan terhadap daerah yang sekarang ini sudah masuk pada musim kering, agar nantinya bisa kita intervensi. Entah dengan sumur atau dengan apa nanti dibicarakan lebih lanjut," ujar Gubernur. (Bdi/Cuk)-f

## PURWOREJO BENTUK KOPERASI MERAH PUTIH

# Sukseskan Program Presiden Prabowo Subianto

**PURWOREJO (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 469 desa/kecamatan se-Kabupaten Purworejo. Program ini merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan 70 ribu koperasi di seluruh desa se-Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti SH saat pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa/kecamatan mendukung program pusat dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan desa di Pendopo Kabupaten Purworejo, Senin (21/4).

"Program ini perlu lang-

kah strategis, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi, optimalisasi dan percepatan pembentukan koperasi desa/kecamatan merah putih harus dilakukan," ucap Yuli.

Ditegaskan, seluruh camat dan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), bersama unsur masyarakat dalam rangka pembentukan koperasi yang dimaksud.

"Pemerintahan desa juga jangan segan untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan camat dan perangkat daerah terkait jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan pem-

entukan koperasi merah putih," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD)

Kabupaten Purworejo, Lak-sana Sakti AP MSi menambahkan, pihaknya masih menunggu zoom meeting besok dengan Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.



Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa/kecamatan.

"Setelah itu kita bisa mengambil langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan melalui surat edaran Bupati. Yang jelas kami mengharapkan untuk desa segera melakukan musyawarah desa khusus terkait dengan pendirian koperasi desa merah putih ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan penyerahan manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan secara simbolis oleh Bupati Purworejo berupa santunan kematian sebesar Rp 42 juta untuk keluarga Kepala Desa Guntur dan keluarga Towilan selaku Kepala Desa Ngargosari. (\*)-5)-f